I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di berbagai bidang kehidupan membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan iptek selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial.

Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Suatu kegiatan atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai suatu bentuk perbuatan pidana memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan suatu negara khususnya dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, ada berbagai persoalan yang lebih fundamental, agar menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama tidak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuk usaha terus dijalankan, khususnya dengan jalan memberikan perlindungan kepada saksi pelapor.¹

Perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang di ketahui dalam kesaksiannya, demikian juga korban.

Kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

yang besar. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pegangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya. Keberadaan lembaga dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu memberi harapan masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik di negeri ini.²

Hanya sebagian orang saja yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, Kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri. Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami gugatan balik atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Selama tidak adanya aturan hukum yang memberikan jaminan bagi saksi atau pelapor, suatu kasus korupsi sangat sulit terungkap.

Peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi,

² Romli Atmasasmita, "Perlindungan Saksi Dalam Perkara Korupsi", *HukumOn Line Indonesia*.

perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur dalam Pasal 41 ayat (2) e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat sebagai pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian terdapat PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain PP No.2 tahun 2002 terdapat juga PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PP No. 57 Tahun 2003 ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005. Walaupun peraturan sudah cukup banyak, karena diaturnya secara komprehensif perlindungan saksi dan pelapor dalam satu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi, kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi dan pelapor.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut yang relatif lebih lengkap adalah perlindungan saksi dan pelapor berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Atas dasar hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi?.
- b. Apa sajakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi?.

2. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini berhubungan dengan kajian hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang memfokuskan pembahasan pada proses, bentuk dan jenis-jenis perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum acara pidana khususnya dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam kasus korupsi.
- b. Praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapainya suatu kepastian hukum dalam bidang perlindungan saksi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁴

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, “tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika

³ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum dan Survey*. Universitas Indonesia, Jakarta.hlm 125

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.hlm 21.

dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.⁵

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada dua.

Menurut Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁶

Selanjutnya pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagai berikut “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu “.⁷

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta : Grasindo, hal. 121

⁶ Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷ Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu :

1. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi).
2. Dengar sendiri.
3. Lihat sendiri.
4. Alami sendiri.
5. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁸

Agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata sendiri berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testomonium de auditu*).

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.⁹

Adapun pengertian dasar dan Guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan judul skripsi ini, perlulah disimak pengertian beberapa istilah-istilah konsep sebagai berikut :

⁸ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 255.

⁹ Soekanto, Soerjono, Op.Cit. hlm 32

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
- b. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm 32